

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2000 – 2009**

**Donna Dwi Istianto**

**Evi Yulia Purwanti, SE., M.Si.**

**Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro**

***ABSTRACT***

*Tax is one main government revenue, because role of the tax revenue are enormous, primaly to support succes development at the national and region. One of domestic tax revenue is advertisement tax. Advertisement tax is the main revenue of Kabupaten Semarang. This was prove during the 2000-2009 for the advertisement tax increase.*

*The purpose of this research is to measure effect the population, number of industries and GDP to advertisement tax in Kabupaten Semarang. The result of this research is expected can contribute to benefit and input local government district in particular Kabupaten Semarang. The research method used is multiple linear regression.*

*The result of regression analysis show total industries and GDP is Significant at  $\alpha = 10$  percent of tax advertisement, while the total population is not significant. Simultaneous test results showed that overall independent variables (total population, total industries, and GDP) simultaneously to show its effect on advertisement tax revenue. R-Square value of 0,979 which mean 97,9 percent of advertising tax revenue variation can be explain from third variation of the independent variables, while the remaining 2,1 percent is explained by other factor beyond the model.*

*Key word : Advertisement Tax, Total Population, Total Industries, GDP and Kabupaten Semarang*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerahdaerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Ghofir, 2000). Untuk itu tahun 2000 diberlakukan otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suparmoko, 2001). Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru yang merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Lincolin Arsyad, 1997).

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah (GBHN, 1999) merupakan tujuan bagian dari pembangunan nasional, serta untuk mencapai tingkat pembangunan yang tinggi dan tetap menjaga kestabilan ekonomi. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional, menegaskan bahwa program penataan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dalam

pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Daerah Otonom terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi pelaksanaan pembangunan di daerah yang berdasar atas asas desentralisasi pemerintah kabupaten semarang berkewajiban mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk keperluan ini pemerintah kabupaten semarang berhak mengali sumber-sumber penerimaan daerah sebagai sumber dana rutin maupun pembangunan daerahnya.

Sesuai dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang program pembangunan nasional, menegaskan bahwa program penataan pengelolaan keuangan daerah secara professional, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya proposi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan. Pembangunan daerah merupakan bagian dari integrasi dan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan daerah (GBHN, 1999). Dengan adanya otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, daerah otonom diberikan keleluasaan untuk mengatur sendiri daerahnya, berbagai upaya dilakukan oleh daerah untuk dapat memaksimalkan penerimaan daerahnya, termasuk memaksimalkan PAD didaerah otonom yang bersangkutan.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2007-2009 (dalam Milyar Rupiah)**

No	Uraian	2007		2008		2009	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	PAD	70,8	10,8	82,9	11,1	90,3	11,6
	Pajak Daerah	15,9		17,9		20,4	
	Retribusi Daerah	37,8		42,5		52,2	
	Bagian Laba Usaha Daerah	2,0		2,9		4,0	
	Lain-lain Pendapatan	15,1		19,6		13,7	
2	Dana Perimbangan	530,3	80,8	594,1	79,4	619,1	79,3
	Bagi hasil Pajak	29,8		44,0		45,4	
	Bagi Hasil Bukan Pajak	0,9		1,1		-	
	Dana Alokasi Umum	455,9		491,2		508,7	
	Dana Alokasi Khusus	43,7		57,8		65,0	
	Dana Kontijensi	-		-		-	
	Dana Darurat	-		-		-	
3	Pos Penerimaan Lain yang Sah	55,2	8,4	70,9	9,5	71,5	
	Jumlah	656,3	100	747,9	100	780,9	100

Dari tabel 1.1 realisasi penerimaan rutin Kabupaten Semarang diatas, terlihat bahwa Kabupaten Semarang masih mengandalkan dana perimbangan dari sisi penerimaannya yang rata-rata mencapai 80 persen dari total penerimaan pada periode 2007-2009, sedangkan total rata pendapatan asli daerah hanya berkisar 11 persen. Walaupun bila dilihat secara keseluruhan total penerimaan rutin Kabupaten Semarang terus mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan asli daerah belum menjadi sumber penerimaan utama. Salah satu sektor PAD yang dijadikan tumpuan adalah pajak daerah. Di Kabupaten Semarang sendiri PAD dari sektor pajak daerah terus mengalami peningkatan yang terbesar terlihat pada tahun 2009 sebesar Rp.20,4 milyar. Ini menjadikan potensi pajak daerah kabupaten semarang masih bisa di tingkatkan dan dikembangkan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti hanya dibatasi mengenai

jumlah wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan pendapatan perkapita 2000-2009 di Kabupaten Semarang.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk di kabupaten semarang terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana pengaruh jumlah industri di kabupaten semarang terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Semarang ?
3. Bagaimana pengaruh PDRB di Kabupaten semarang terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Semarang?
- 4.

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di kabupaten semarang. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis berapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Semarang.
2. Menganalisis berapa besar pengaruh jumlah industri terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Semarang.
3. Menganalisis berapa besar pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Semarang.
4. Menganalisis secara bersama-sama berapa besar pengaruh jumlah penduduk, jumlah industri dan PDRB terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Semarang.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian tersebut adalah :

Menambah khasanah keilmuan serta sumber pustaka (referensi) dalam bidang pengembangan potensi Pajak Daerah di Kabupaten Semarang, khususnya Pajak Reklame. Sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk menyadari pentingnya membayar pajak. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan

realisasi pajak Reklame Kabupaten Semarang. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Semarang.

## **II TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **2.1 Landasan Teori**

Tentang pengertian pajak, ada beberapa pendapat dari para ahli. Menurut Usman dan K Subroto (1980) pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan. Pajak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (R. Santoso Brotodihardjo, 1991). Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. Dari sudut pandang keuangan, pajak dipandang bagian

yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang sosiologi ini pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat/dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat sendiri (Waluyo dan Wirawan, 2003).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu :

1. Dini Nurmayati (2010) melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang”. Dengan menggunakan regresi berganda. Variabel yang digunakan adalah penerimaan pajak reklame kota semarang, pertumbuhan penduduk, jumlah industri dan jumlah PDRB.

Model analisis yang digunakan :

$$\text{LOGPjk\_Rekl} = \beta_0 + \beta_1 \text{LOGPddk} + \beta_2 \text{LOGIndst} + \beta_3 \text{LOGPDRB} + e$$

Dimana:

PJK\_REKL = Penerimaan Pajak Reklame (dalam rupiah)

PDDK = Pertumbuhan Penduduk (dalam jiwa)

INDUST = Jumlah Industri (dalam angka)

PDRB = Jumlah PDRB (dalam rupiah)

Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Variabel Jumlah Penduduk (PDDK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame (PJK\_REKL), Variabel Jumlah Industri (INDUST) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame (PJK\_REKL), Variabel Jumlah PDRB Perkapita (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame (PJK\_REKL), dan Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel penerimaan Pajak Reklame secara berturut – turut adalah variabel jumlah penduduk, variabel jumlah industri, dan yang terakhir adalah variabel PDRB.

2. Arif Budi Wibowo (2009) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Kendal”. Dengan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Pajak Reklame.

Alat analisis yang digunakan adalah persamaan regresi linier berganda. Persamaan regresi yang digunakan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y =Penerimaan Pajak Reklame

X1=Jumlah wajib pajak reklame (orang/badan)

X2=Pendapatan Wajib Pajak (Rp)

X3=Pendapatan Perkapita (Rp)

Dari analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah wajib pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak reklame, pendapatan wajib pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak reklame dan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak reklame.

3. Sutrisno (2002) dalam penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kabupaten Semarang”. Dengan menggunakan analisis regresi. Variabel yang digunakan adalah inflasi, pendapatan perkapita, jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah penduduk, jumlah industri, jumlah kendaraan, jumlah pelanggan listrik, jumlah petugas pajak, sedangkan yang mempengaruhi pajak reklame adalah laju inflasi, jumlah penduduk, jumlah industri, dan petugas pajak. Namun setelah dianalisis inflasi tidak berpengaruh signifikan dengan t-hitung, sedangkan jumlah penduduk, berpengaruh positif sebesar 1 persen akan mendorong meningkatnya pajak reklame 23,5 persen. Dengan asumsi faktor-faktor lain tidak berubah.

### **2.3 Hipotesis**

Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (J. Supranto, 1997). Setelah adanya kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :



1. Diduga jumlah Penduduk mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Semarang.
2. Diduga Jumlah industri mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Semarang.
3. Diduga PDRB mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Semarang.
4. Diduga Secara bersama-sama Jumlah Penduduk, Jumlah Industri dan PDRB mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Semarang.

### **III.METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel secara sederhana dapat diartikan ciri dari individu, obyek, segala peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif/kualitatif. Hasil pengukuran suatu variabel bisa konstan atau tetap, bisa juga berubah-ubah (Nana Sudjana, 1999). Definisi operasional merupakan pengubahan konsep yang masih berupa abstrak dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain berdasarkan variabel yang digunakan (Hadi, 1996) Sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan dalam rangka pengujian hipotesis yang diajukan, maka dalam penelitian ini yang dijadikan variabel yang diteliti adalah sebagai berikut:

##### **3.1.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya tergantung pada nilai variable lain yang merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi pada variable bebas (variabel independen). Dalam penelitian ini pajak reklame yang merupakan salah satu pajak Kabupaten Semarang dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan

pembiayaan di Kabupaten Semarang dari tahun 2000 sampai dengan 2009 dijadikan sebagai variabel terikat, variable pajak reklame ini diukur dalam rupiah.

### **3.1.2 Variabel Independen**

Dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel independen sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk

Adalah jumlah penduduk pertengahan tahun di Kabupaten Semarang. Data jumlah penduduk diukur dalam satuan orang.

2. Jumlah industri

Adalah jumlah usaha industri baik industri kecil, menengah maupun besar yang ada di Kabupaten Semarang. Data jumlah industri diukur dalam satuan unit.

3. PDRB

Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (sektor) dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dan dihitung menurut harga konstan. Data yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993. PDRB diukur dalam satuan rupiah.

## **3.2 Jenis dan Sumber Data**

### **3.2.1 Jenis Data**

Data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dalam suatu penelitian ilmiah. Jenis data yang tersedia harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu penelitian. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menentukan lokasi penelitian di Kabupaten Semarang. Data yang digunakan adalah data sekunder selama Sepuluh tahun. Adapun data yang digunakan adalah:

1. Penerimaan pajak reklame dan penerimaan pajak daerah Kabupaten Semarang tahun 2000-2009.
2. Jumlah penduduk Kabupaten Semarang tahun 2000-2009
3. Jumlah industri Kabupaten Semarang tahun 2000-2009
4. PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993 Kabupaten Semarang tahun 2000-2009

### 3.2.2 Sumber Data

Sedangkan data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, yaitu dari publikasi instansi-instansi pemerintah seperti:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Povinsi Jawa Tengah
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang
3. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Semarang

### 3.4 Metode Analisis

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) maka penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda (*Multiple Linier Regression Method*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square (OLS)*. Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang ideal dan dapat diunggulkan, yaitu secara teknis sangat kuat, mudah dalam perhitungan dan penarikan interpretasinya (Gujarati, 1999).

Persamaan Regresi dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$\text{Log} Y = \alpha + \beta_1 \text{Log} X_1 + \beta_2 \text{Log} X_2 + \beta_3 \text{Log} X_3 + e$$

Dimana:

Y = Penerimaan pajak reklame (dalam ribuan rupiah)

X<sub>1</sub> = Jumlah penduduk (orang)

X<sub>2</sub> = Jumlah industri (unit)

X<sub>3</sub> = PDRB (dalam jutaan rupiah)

## Uji Statistik

Analisis dilakukan melalui pendekatan analisis kuantitatif yaitu dengan model regresi dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS). Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan pada penelitian ini.

### 1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistic bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dengan hipotesis untuk menunjukkan apakah semua variable bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamasama terhadap variabel tak bebas. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variable jumlah penduduk, jumlah industri dan jumlah PDRB.

$H_1 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ , yaitu terdapat pengaruh signifikansi variabel jumlah penduduk, jumlah industri dan jumlah PDRB.

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel, dimana nilai F hitung dapat dipenuhi dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

F hitung =

dimana :

R<sup>2</sup>: koefisien determinasi

k : jumlah variabel independen termasuk konstanta

n : jumlah sampel

Apabila nilai F hitung > F tabel maka H<sub>0</sub> ditolak dan menerima H<sub>1</sub>. Artinya ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variable dependen. Sebaliknya apabila, F hitung < F<sub>tabel</sub> maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak. Artinya tidak ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Imam Ghozali, 2005). Untuk menentukan

kesimpulan dengan menggunakan nilai F hitung dengan F tabel dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

## 2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t merupakan metode pengujian koefisien regresi untuk menguji tingkat signifikansi masing-masing koefisien yang mempengaruhi penerimaan pajak Reklame Kabupaten Semarang digunakan uji t dengan menggunakan hipotesis nol. Dengan rumus yang digunakan adalah :

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\beta_t}{S_e(\beta)}$$

Dimana :  $\beta_t$  = koefisien regresi

$S_e$  = standart deviasi

Kriteria pengujian :

1.  $H_0 : \beta_1 \leq 0$  tidak terdapat pengaruh positif antara variable jumlah penduduk secara individual terhadap penerimaan pajak reklame.

$H_1 : \beta_1 > 0$  terdapat pengaruh positif antara variabel jumlah penduduk secara individual terhadap penerimaan pajak reklame.

2.  $H_0 : \beta_2 \leq 0$  tidak terdapat pengaruh positif antara variable jumlah industri secara individual terhadap penerimaan pajak reklame.

$H_1 : \beta_2 > 0$  terdapat pengaruh negatif antara variabel jumlah industri secara individual terhadap penerimaan pajak reklame.

3.  $H_0 : \beta_3 \leq 0$  tidak terdapat pengaruh positif antara variable PDRB secara individual terhadap penerimaan pajak reklame.

$H_1 : \beta_3 > 0$  terdapat pengaruh positif antara variabel PDRB secara individual terhadap penerimaan pajak reklame.

Cara melakukan uji t melalui pengambilan keputusan sebagai berikut:

Membandingkan nilai stastistik t dengan kritis menurut tabel.

1. Jika  $t$ -hitung  $>$   $t$ -tabel, dengan derajat keyakinan 90 persen (probability  $<$  0,10), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima ini berarti terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika  $t$ -hitung  $<$   $t$ -tabel, dengan derajat keyakinan 90 persen (probability  $<$  0,10), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak ini berarti tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

### 3. Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

$R^2$  bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) dengan digunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tak bebas ( $Y$ ) yang di jelaskan oleh variabel bebas ( $X$ ) (Gujarati. 2003). Koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{\beta_1 \sum Y_1 X_{1i} + \beta_2 \sum Y_2 X_{2i} + \beta X_3 \sum Y_{3 \times 3i}}{\sum Y_1^2}$$

Nilai  $R^2$  yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model. Dimana  $0 < R^2 < 1$  sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Nilai  $R^2$  yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel tidak bebas dan sangat terbatas.
2. Nilai  $R^2$  mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel tidak bebas.

## IV.HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Letak Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada  $110^{\circ}14'54,75''$  sampai dengan  $110^{\circ}39'3''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}3'57''$  sampai dengan  $7^{\circ}30'$  Lintang Selatan. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas 95.020,674 Ha. Secara administratif letak geografis Kabupaten Semarang di batasi oleh 6 wilayah Tingkat II pada sisi-sisinya. Selain itu ditengahnya wilayah Kabupaten Semarang juga terdapat Wilayah Administrasi Tingkat II yaitu Kota Salatiga. Disisi sebelah barat, Wilayah Kabupaten Semarang berbatasan dengan wilayah administrasi Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung, disisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Sementara disisi sebelah timur wilayah Kabupaten Semarang berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang.

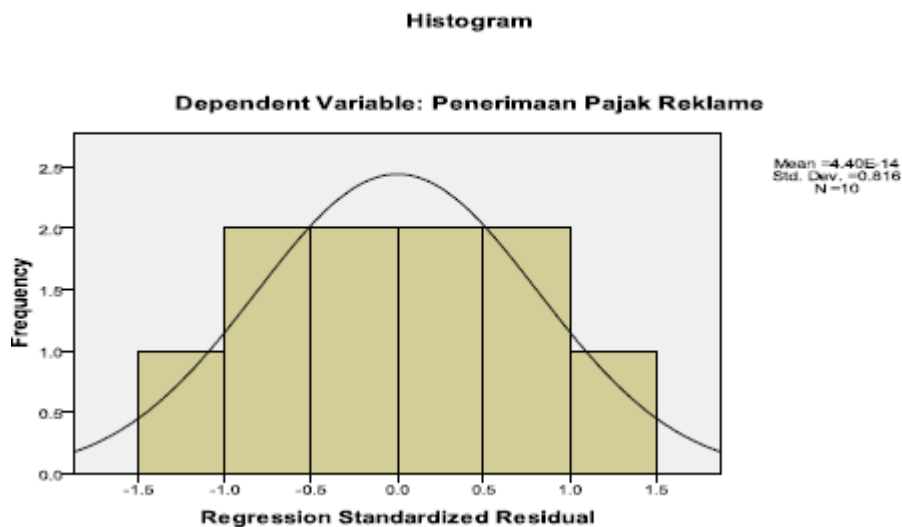
### 4.2 Uji Asumsi Klasik

Ada beberapa asumsi-asumsi dari model regresi yang perlu diuji validitasnya. Asumsi dasar tersebut adalah sebagai berikut:

#### 4.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau grafik histogram dari residualnya. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dan jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak

menunjukkan pola distribusi normal, maka model tidak memenuhi asumsi normalitasnya.



Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas kedua-duanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengambilan kesimpulan dengan melihat tampilan grafik histogram. Pada gambar grafik histogram hampir menyerupai genta yang berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas artinya layak pakai.

#### 4.2.2 Uji Terhadap Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi ada/tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW).

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.990 <sup>a</sup>	.979	.969	.01829851	2.232

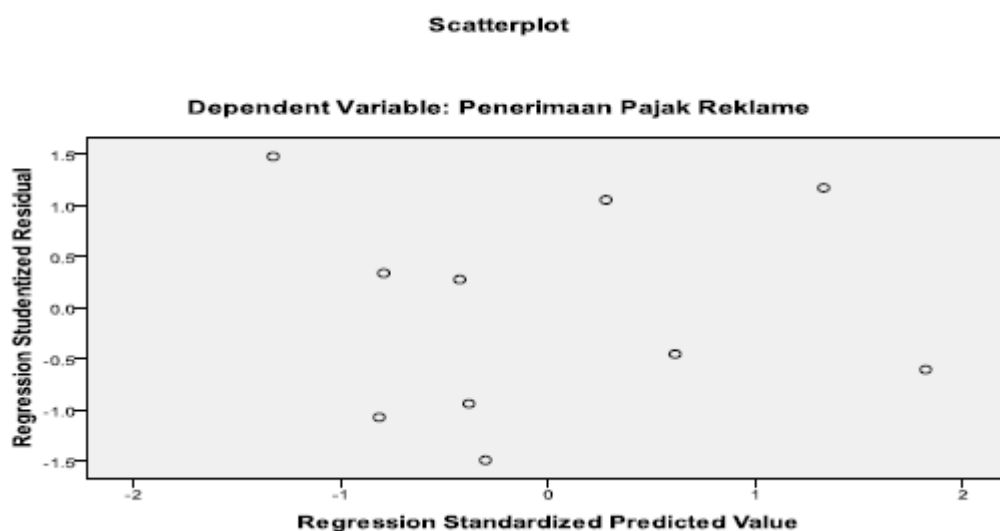
Berdasarkan output SPSS pada tabel 4.5 uji autokorelasi, dalam *model summary* nilai DW sebesar 2,232. Nilai ini akan diperbandingkan dengan nilai



DW Tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 10 persen, untuk n sejumlah 10 dan jumlah variabel bebas 3. Berdasarkan tabel tersebut didapatkan nilai DW tabel sebagai berikut: batas atas ( $du$ ) = 1,46 dan batas bawah ( $dl$ ) = 0,59, Oleh karena nilai DW lebih besar dari batas atas ( $du$ ) dan lebih kecil dari  $4-du = 4-1,46=2,54$ . Hal ini dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif pada model regresi tersebut.

#### 4.2.3 Uji Terhadap Gejala Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas akan memperlemah kemampuan prediksi suatu model regresi. Model regresi dikatakan baik, apabila tidak terjadi heteroskedastisitas (homoskedastisitas). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik plot scatterplot antara variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residualnya ( $Y$  prediksi –  $Y$  sesungguhnya). Apabila pola pada grafik yang ditunjukkan dengan titik-titik yang dapat membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka telah terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya apabila titik-titik pada grafik tidak membentuk suatu pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



#### 4.2.4 Uji Terhadap Gejala Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel variabel bebas sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi yaitu (1) Nilai *R square* ( $R^2$ ) yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen (terikat); (2) Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel bebas. Jika antara variabel bebas ada korelasi cukup tinggi (umumnya) di atas (0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas; (3) Melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu model regresi bebas dari masalah multikolinieritas apabila mempunyai nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10 (Ghozali, 2001).

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Jumlah Penduduk	.160	6.240
Jumlah Industri	.501	1.996
PDRB	.121	8.252

Hasil penelitian diperoleh bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *Tolerance* yang kurang dari 0,1 (10 persen) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga tidak lebih dari 10. dengan demikian pendeteksian tersebut menunjukkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinieritas.

#### 4.3 Persamaan Regresi

Berdasarkan perhitungan regresi linier berganda yang telah dilakukan dengan bantuan program SPSS (lihat lampiran Analisis Regresi) dapat diketahui persamaan regresi pengaruh antara masing-masing variabel independen dengan

variabel dependen secara keseluruhan pada Kabupaten Semarang adalah:

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4.263	2.334		-1.826	.118
Log Jumlah Penduduk	-1.277	.711	-.263	-1.795	.123
Log Jumlah Industri	.347	.164	.175	2.111	.079
Log PDRB	2.698	.418	1.092	6.485	.001

Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$\text{Log Y} = -4,263 - 1,277 \text{ Log X1} + 0,347 \text{ Log X2} + 2,698 \text{ Log X3} + e$$

Dari hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Nilai konstanta (a) sebesar -4,263 mempunyai arti bahwa bila semua variabel bebas sama dengan nol, maka pajak reklame rata-rata sebesar -- 4,263 rupiah atau tidak ada penerimaan sama sekali.
- b. Nilai koefisien regresi jumlah industri sebesar 0,347 dan bertanda positif dapat diartikan bahwa antara jumlah industri dengan Pajak reklame berbanding lurus, bila jumlah industri mengalami kenaikan 1 persen maka penerimaan pajak reklame meningkat 0,347 persen.
- c. Nilai koefisien regresi PDRB sebesar 2,698 dan bertanda positif dapat diartikan bahwa antara PDRB dengan Penerimaan pajak reklame berbanding lurus, bila PDRB bangunan meningkat 1 persen maka Penerimaan Pajak Reklame bertambah sebesar. 2,698 persen.

## 4.4 Pengujian Statistik

### 4.4.1 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi jumlah penduduk, jumlah industri dan PDRB secara bersama-sama terhadap penerimaan Pajak reklame.

Model	Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.095	3	.032	95.058	.000 <sup>a</sup>
Residual	.002	6	.000		
Total	.097	9			

Dari hasil perhitungan F-hitung (95,058) dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari  $\alpha=0,1$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan dari jumlah penduduk, jumlah industri dan PDRB terhadap penerimaan pajak reklame

#### 4.4.2 Uji T

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh jumlah penduduk, jumlah industri dan PDRB secara parsial terhadap penerimaan pajak reklame.

1. Pengujian Hipotesis pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap penerimaan pajak reklame Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t-hitung sebesar -1.795 dengan signifikansi sebesar 0,123 atau di atas 0,1. Dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Maka dapat disimpulkan ada pengaruh yang tidak signifikan dari jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak reklame pada taraf uji signifikan 0,1.
2. Pengujian Hipotesis pengaruh Jumlah Industri Terhadap penerimaan pajak reklame Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t-hitung sebesar 2.111 dengan signifikansi sebesar 0,079 atau di bawah 0,1 atau signifikan pada  $\alpha = 10$  persen. Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan dari jumlah industri terhadap penerimaan pajak reklame pada taraf uji signifikan 0,1. Arah koefisien positif dari variabel jumlah industri menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan Pajak reklame.
3. Pengujian Hipotesis pengaruh PDRB Terhadap penerimaan pajak reklame Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t-hitung sebesar 6.485 dengan signifikansi sebesar 0,001 atau di bawah 0,1. Dengan demikian  $H_0$  ditolak

dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan ada pengaruh yang signifikan dari PDRB terhadap penerimaan pajak reklame pada taraf uji signifikan 0,1. Arah koefisien positif dari variabel PDRB menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan Pajak reklame.

#### 4.5 Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)

Hasil analisis ketetapan model (*goodness of fit*) tercermin dari koefisien determinasi yaitu R square dan Adjusted R square Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), yaitu angka yang menunjukkan besarnya daya menerangkan dari variasi independen terhadap variabel dependen pada model tersebut.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.990 <sup>a</sup>	.979	.969	.01829851	2.232

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 17 menunjukkan nilai *R square* sebesar 0,979 atau sebesar 97,9 persen. Angka ini menunjukkan bahwa 97,9% besarnya penerimaan pajak reklame dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jumlah industri dan PDRB secara bersama-sama dan 2,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain.

#### 4.6 Pembahasan

Dalam analisis ini menyatakan bahwa variable-variabel penelitian yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Semarang selama 10 tahun, yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 adalah jumlah industri dan PDRB. Pengaruh variable-variabel penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **Pengaruh Jumlah Industri Terhadap Penerimaan Pajak Reklame**

Secara statistik hasil analisis jumlah industri terbukti signifikan, artinya secara statistik jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Jumlah industri adalah jumlah usaha industri baik industri kecil, menengah, maupun besar yang ada di Kabupaten Semarang. Jumlah industri yang

menggunakan jasa pemasangan reklame juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Hal ini disebabkan apabila suatu industri yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan atau memasang reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Dini Nurmayati (2010), yang menyimpulkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara jumlah industry terhadap penerimaan pajak reklame.

### **Pengaruh PDRB terhadap Penerimaan Pajak Reklame**

PDRB merupakan penjumlahan dari nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh sektor ekonomi. Secara statistik hasil analisis PDRB terbukti signifikan, artinya secara statistik PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Salah satu faktor penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah tertentu dalam suatu periode tertentu dapat ditunjukkan oleh data PDRB daerah tersebut. Apabila nilai PDRB mengalami peningkatan maka akan membawa pengaruh positif pada kenaikan penerimaan daerah. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah, sehingga semakin tinggi pula kemampuan masyarakat tersebut untuk membayar Pajak Daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Dini Nurmayati (2010) yang menyimpulkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara PDRB terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Semarang.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Variabel Jumlah Industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame, hal ini dikarenakan nilai *t-statistic* sebesar 2.111 dengan probabilitas sebesar 0,079 maka variabel ini berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak reklame. Sedangkan nilai *coefficient* menunjukkan angka sebesar 0,347 yang berarti bahwa setiap penambahan

industri sebanyak 1 persen akan meningkatkan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Semarang sebesar 0,347 persen.

2. Variabel Jumlah PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame, hal ini dikarenakan nilai *t-statistic* sebesar 6,485 dengan probabilitas sebesar 0,001 maka variabel ini berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak reklame. Sedangkan nilai *coefficient* menunjukkan angka sebesar 2,698 yang berarti bahwa kenaikan 1 persen terhadap PDRB akan meningkatkan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Semarang sebesar 2,69 persen.
3. Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel penerimaan Pajak Reklame adalah variabel PDRB. Besarnya koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 0,979 yang berarti 97,9 persen variasi variabel Penerimaan Pajak Reklame pada model dapat dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk, jumlah industri, dan PDRB, Sedangkan sisanya sebesar 2,1 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengalami beberapa keterbatasan dalam beberapa hal, diantaranya:

1. Jumlah tahun/periode masih kurang banyak. Meskipun hal ini disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan data di lapangan.
2. Jumlah variabel independen dalam model masih terbatas.

## 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran-saran bagi perusahaan sebagai masukan terutama untuk menjaga tingginya penerimaan Pajak reklame.

1. Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Reklame hendaknya diciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan industri dengan meningkatnya jumlah industri diharapkan pemasangan reklame juga akan meningkat.

2. Pemerintah Kabupaten Semarang bersama-sama dengan DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) hendaknya dapat menyikapi dengan meningkatnya jumlah objek reklame di Kabupaten Semarang maka realiasi penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Semarang akan meningkat sehingga penerimaan PAD juga meningkat. Maka dengan adanya peningkatan penerimaan PAD dapat digunakan untuk membiayai pembangunan Kabupaten Semarang.
3. Pemerintah Kabupaten Semarang harus secara berkala dan lebih serius menata pemutakhiran data-data yang berkaitan dengan aspek administrasi, baik pada saat perencanaan, penentuan, dan pelaksanaan pajak reklame. Salah satu yang cukup penting yang selama ini kurang berjalan baik adalah pelibatan masyarakat calon wajib pajak reklame dalam menentukan obyek pajak. Pemerintah Kabupaten Semarang perlu melakukan terobosan-terobosan baru penggalan wajib pajak reklame baru guna meningkatkan penerimaan pajak. Peran aktif aparat Pemda sesungguhnya lebih diperlukan untuk melakukan terobosan penggalan wajib pajak baru secara serius.
4. Pada agenda penelitian mendatang diharapkan agar hasil penelitian mendatang lebih komprehensif, selayaknya tahun/periode pengamatan lebih diperpanjang dan melibatkan lagi berbagai variable yang dimungkinkan berpengaruh relative kuat, baik bersifat internal dan eksternal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofir, 2000. Optimalisasi Pajak dalam Penerapan Otonomi Daerah Berita Pajak No. 15 Januari 2000. Jakarta.
- Alfians Lams, 1985, **Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru, PRISMA**
- Badan Pusat Statistik. **Jawa Tengah Dalam Angka** berbagai edisi : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah
- Davey, K.J, **Pembiayaan Pemerintah Daerah Terjemahan Amanullah**, UI Press, Jakarta
- Gujarati, Darmodar, 1995, **Ekonometrika Dasar**, Terjemahan Sumarno Zein, Penerbit Erlangga Jakarta.
- Guritno Mangkusubroto, 1994, **Ekonomi Publik**, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Imam Ghozali, 2005, **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS**
- Edisi Revisi, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang J. Supranto. 1996. **Statistik Teori dan Aplikasi**. Jakarta : Erlangga
- Jaka Sriyana, 1999, Hubungan keuangan Pusat – Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah, **Jurnal Ekonomi Pembangunan**, Vol. 4 No. 1 hal 312 – 323.
- Kesit Bambang Prakoso, 2005, **Pajak dan Retribusi Daerah** , Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta.
- Lincoln, Arsyad, 1999, **Ekonomi Pembangunan**, Edisi keempat, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2000. **Perpajakan**. Yogyakarta: ANDI
- Marihot P Siahaan, 2005, **Pajak dan Retribusi Daerah**, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro, 1997, **Ekonomi Pembangunan**, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

- Munawar Ismail, 2001. **Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah**,  
Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Musgrave, 1993. **Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek**, edisi V  
Erlangga, Jakarta.
- Jhingan, M.L. 2000. **Ekonomi dan Pembangunan**. Jakarta : Rajawali Press
- Sadono Sukirno, 1994, **Pengantar Teori Makro Ekonomi**, Edisi Kedua,  
PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Slamet, Munawir, Dasar-dasar Perpajakan, 2001, edisi V Erlangga, Jakarta.
- Soemitro, Rachmat, 1986, **Azaz dan dasar Perpajakan I**, P.T Rafika Adi tama,  
Bandung.
- Subroto K, Usman B. 1980. **Pajak-pajak Indonesia**. Jakarta: Yayasan Bina  
Pajak.
- Sudarsono, 1988, **Ekonomi Sumber Daya Manusia**, Universitas Terbuka,  
Jakarta.104
- Sunarto, 2005, **Pajak dan Retribusi Daerah**, Amus Yogyakarta dan Citra  
Pustaka Yogyakarta.
- Suparmoko, 1991, **Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek** , BPFE,  
Yogyakarta
- Undang – Undang Nomor 22/1999. **Tentang Pemerintah Daerah**, PT Aneka  
Ilmu, Semarang.
- Undang – Undang Nomor 25/1999. **Tentang Perimbangan Keuangan Antara  
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat**, PT Aneka ilmu,Semarang.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 **Tentang Otonomi Daerah**